

EFEKTIVITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MEMITIGASI TENDENSI KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Frida Fanani Rohma

Jurusan Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: frida.frohma@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Fraud in the procurement of goods and services is a crucial problem in government. The development of information technology that is increasingly massive is considered to be able to strengthen control mechanisms and encourage transparency. The policy of implementing electronic government (e-government) is a breakthrough to make the government more open. This study examines the effect of information and communication on fraudulent procurement of goods and services. This study uses a quantitative survey approach in the Regional Work Units. The results have shown that a strong information and communication system can minimize the potential for fraud in the procurement of goods and services. In line with the agency perspective, the presence of information and communication can reduce information asymmetry which causes a decrease in dysfunctional behavior. Information and communication mechanisms encourage more substantial transparency to have the potential to minimize lobbying and negotiations to win auctions for the procurement.

Keywords: *procurement of goods and services, fraud, information, communication, control*

ABSTRAKSI

Kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan masalah krusial di pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin massif dinilai dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan mendorong transparansi. Kebijakan penerapan electronic government (*e-government*) merupakan sebuah terobosan untuk menjadikan pemerintah menjadi lebih terbuka. Penelitian ini menguji pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya sistem informasi dan komunikasi dapat meminimalkan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Selaras dengan perspektif keagenan bahwa adanya informasi dan komunikasi dapat menurunkan asimetri informasi yang menyebabkan turunya perilaku disfungsi. Mekanisme informasi dan komunikasi mendorong transparansi yang semakin kuat sehingga berpotensi meminimalkan lobby dan negosiasi untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa.

Kata-kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Kecurangan, Informasi, Komunikasi, Pengendalian

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah hingga pada pengadaan barang dan jasa (Wardani *et al.*, 2021; Yusni, 2022). Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk memenuhi keperluan operasional hingga barang modal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, hampir 35-40% dari APBN/APBD atau setara dengan Rp. 450 triliun disalurkan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Melihat besarnya alokasi anggaran yang disalurkan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka, pengadaan barang dan jasa juga berpotensi menimbulkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (Francesco & Hastuti, 2022).

Pengadaan barang merupakan sumber utama kebocoran anggaran Negara yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam bentuk korupsi dan kolusi (Francesco & Hastuti, 2022; Hardjaloka, 2014; Tuanakotta, 2010). Adanya penyimpangan tersebut berpotensi berdampak pada kemerosotan pelayanan bagi masyarakat di Indonesia (Francesco & Hastuti, 2022; Syamsuddin, 2020; Rohma *et al.*, 2023). Indeks Hasil Pemeriksaan Sementara pada semester I di 2013 mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp.56,98 triliun. Sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp. 10,74 triliun.

Rendahnya transparansi proses pengadaan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang (Romaissah *et al.*, 2018). Banyaknya kasus penyimpangan dalam hal pengadaan barang adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengawasi kinerja para perangkatnya. Penyimpangan dan penyalahgunaan dalam kegiatan pengadaan barang termasuk dalam kategori *fraud* (Francesco & Hastuti, 2022). Beberapa kerangka akuntabilitas yang dirancang untuk mencegah adanya penyimpangan kegiatan pengadaan barang di Indonesia telah gagal dilaksanakan (Tuanakotta, 2010).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin massif (Rohma & Zakiyah, 2022) dengan adanya sistem digitalisasi diharapkan dapat mendorong transparansi (Hermiyetti, 2011; Rahmadhani & Suparno, 2020). Tuntutan adanya *e-government* disambut baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintah kemudian menerbitkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Hardjaloka (2014) menjelaskan bahwa peluang diterapkannya pemerintahan berbasis elektronik yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi untuk mengurangi korupsi. Varquez *et al.* (2008) menjelaskan bahwa hadirnya sistem pemerintahan elektronik merupakan perangkat untuk mengurangi diskresi oleh pejabat publik karena adanya teknologi membuat proses birokrasi menjadi lebih transparan, sehingga meminimalkan adanya potensi intervensi pejabat publik.

Perkembangan penelitian telah berupaya menginvestigasi dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kecurangan. Choirunnisa & Rufaedah (2022) mengkaji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap pendeteksian *fraud*. Nurjanah *et al* (2021) dan Melasari (2019) menginvestigasi dampak teknologi dalam kecurangan akademik. Korompis (2014) mengkaji peran teknologi informasi dalam pengendalian internal untuk memitigasi kecurangan. Perkembangan penelitian sebagian besar memandang peran teknologi informasi pada konteks kecurangan akuntansi secara umum.

Masih terbatas yang mempertimbangkan pada konteks pemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Beberapa penelitian yang mempertimbangkan keterkaitan konteks teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa serta *fraud* seperti Nugroho (2015), Salim *et al.* (2016), Wardani *et al.* (2021), Yusni (2022) serta Nuryanti (2015) mengkaji mengenai implementasi sistem e-procurement terhadap potensi *fraud*. Akan tetapi, penelitian tersebut masih terbatas mengkaji teknologi informasi dari perspektif implementasi sistem. Sementara, peran krusial teknologi informasi tidak hanya pada implementasi sistem. Lebih dari itu, peran teknologi informasi dalam hal menyebarkan informasi perlu diperhatikan. Sebagaimana, berdasarkan perspektif teori keagenan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan terjadinya pengurangan asimetri informasi sehingga berpotensi meminimalkan perilaku disfungsi (Rohma, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menginvestigasi pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei pada salah satu SKPD di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan informasi dan komunikasi cukup mampu menurunkan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penulisan artikel ini secara berurutan mencakup literatur review, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan serta simpulan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Teori keagenan Jensen & Meckling (1979) menjelaskan bahwa pada suatu kontrak keagenan adanya asimetri informasi akibat ketidaksetaraan informasi antara agent dan prinsipal sertanya adanya moral hazard dapat mendorong individu melakukan perilaku oportunistik untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya. Pada konteks pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan wali amanah, sementara masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan amanah. Pada konteks pengadaan barang dan jasa agen sebagai pelaku kegiatan dimungkinkan memiliki informasi yang lebih banyak dari pada prinsipal.

Sementara, dengan adanya *moral hazard* pada agen dapat membuatnya melakukan perilaku oportunis dalam bentuk melakukan kecurangan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya (Rohma, 2022). Perkembangan teknologi yang semakin massif membuat informasi menjadi mudah diakses. Kemudahan akses informasi dapat berdampak pada tingginya proses informasi dan komunikasi. Adanya informasi yang diperoleh dapat menjadi salah satu media komunikasi yang dapat menurunkan asimetri informasi. Rendahnya asimetri informasi berpotensi menurunkan kesempatan agen untuk berperilaku oportunis selama proses pengadaan barang dan jasa.

Infomasi, Komunikasi, dan Pengendalian Internal

Hall (2001) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi. Hall (2001) menyebutkan bahwa pengendalian internal terdiri atas tiga tingkatan pengendalian yaitu pengendalian preventif (pencegahan), pengendalian deteksi, dan pengendalian koreksi. Sistem informasi akuntansi mencakup pencatatan hingga metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, hingga melakukan pencatatan transaksi keuangan dan non-keuangan pada organisasi.

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi memengaruhi kemampuan manajemen melakukan tindakan dan membuat keputusan berkaitan dengan operasi organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan (Hall, 2001). Menurut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pasal 41, setiap instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Sedangkan SPIP

pasal 42 menjelaskan bahwa komunikasi atas informasi harus diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi setidaknya harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki system informasi secara terus menerus.

Informasi dan Komunikasi terhadap Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Potensi terjadinya kecurangan pada pemerintahan daerah banyak terdapat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (Nuryanti, 2015; Salim *et al.*, 2016; Wardani *et al.*, 2021; Yusni, 2022). Hal ini dibuktikan oleh kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menyebutkan bahwa 80% kasus korupsi yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kasus yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. ICW juga menyebutkan bahwa Negara telah mengalami kebocoran APBN sebesar Rp 60 – 70 triliun per tahun anggaran akibat dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang disalahgunakan oleh oknum pejabatnya.

Beberapa penelitian berhasil menunjukkan adanya pengaruh mekanisme pengendalian internal terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa (Hermiyetti, 2011; Puspasari, 2012). Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak dapat dihindari oleh setiap individu, kelompok masyarakat, bahkan organisasi termasuk pemerintah. Tuntutan akan kecepatan akses informasi menuntut pemerintah untuk tidak bekerja secara manual namun dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif sehingga pengelolaan pemerintah menjadi lebih tepat guna dan tepat daya. Sebelum implementasi *e-government* pemerintah lebih cenderung melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan *paper-based administration*. Pemerintah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Teknologi akan mempermudah baik *user* maupun *preparer* dalam mempersiapkan dan memperoleh informasi publik.

Berdasarkan perspektif keagenan Jensen & Meckling (1979) bahwa adanya pertukaran informasi dapat menurunkan potensi asimetri informasi yang menurunkan perilaku disfungsional. Hal ini selaras dengan penjelasan Varquez *et al* (2008) bahwa hadirnya media informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat yang dapat mengurangi diskresi dan diintervensi pejabat publik. Adanya informasi dan komunikasi dimungkinkan dapat meminimalkan asimetri informasi sehingga meningkatkan transparansi (Rohma & Zakiyah, 2022). Adanya transparansi dapat digunakan sebagai bentuk pengawasan untuk meminimalkan potensi kecurangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini:

Ha: Informasi dan Komunikasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jenis data pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu kabupaten di Jawa Timur. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: Pegawai di SKPD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam struktur organisasi SKPDnya.

Ketiga jabatan ini keberadaannya sangat terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pegawai di SKPD yang melakukan kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa. Pelelangan pengadaan barang dan jasa ini biasanya dilakukan saat kegiatan pengadaan barang dan jasa nilai nominalnya melebihi Rp.200.000.000, dan Panitia Lelang yang berada di lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai Unit Layanan Pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Variabel dan Teknis Analisis Data

Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu informasi dan komunikasi. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kecurangan pengadaan barang dan jasa. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner skala likert terdiri dari "sangat setuju" sampai dengan "sangat tidak setuju". Urutan skala adalah sebagai berikut: sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, kurang setuju diberi skor 3, setuju diberi skor 4 dan sangat setuju diberi skor 5. Berikut ini pada tabel 1 disajikan dimensi dan indikator untuk setiap variabel.

Tabel 1. Dimesi dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator
Pengadaan Barang dan Jasa	Inefisiensi Meminimalkan ketidaksesuaian barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan.

	Ketidaktepatan waktu pengerjaan	Penyelesain kegiatan pengadaan menjadi lebih cepat.
	<i>Mark up</i>	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang dikerjakan penyelia.
	<i>Fraud</i>	Menghindari ketidaksesuaian <i>volume</i> (kuantitas) barang/jasa yang diselesaikan dengan perjanjian di kontrak.
	Ketidaksesuaian	Mencegah ketidakwajaran harga yang disepakati dalam kontrak karena danya potensi <i>mark up</i> harga.
Informasi dan Komunikasi	Ketersediaan	Ketersediaan sistem informasi dan komunikasi
	Pembaharuan sistem informasi dan komunikasi	Pembaharuan sistem informasi dan komunikasi secara berkala

Sumber: Data diolah, 2022

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka dilakukan uji kualitas data pada penelitian ini mencakup uji validitas dan reliabilitas dengan *Cronbach Alpha*. Selain itu, pengujian normalitas dilakukan sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa residual data berdistribusi normal. Pengujian hipotesis pada penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melakukan peramalan nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat guna membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel. Model persamaan dari regresi linear sederhana adalah: $Y = a + b_1X_1 + e$

Y= Kecurangan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi

X_1 = Informasi dan Komunikasi

E = *error term*

HASIL PENELITIAN

Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebagaimana disajikan pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada 60 responden, namun kuesioner dan Kembali dan dapat diolah dapat diolah sebanyak 53 kuesioner. Responden dalam penelitian ini juga terdiri dari

berbagai jenjang Pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel 3 bahwa responden yang mempunyai pendidikan terakhir D3 sebanyak 6 orang atau sebesar 11,4%, yang mempunyai pendidikan terakhir S1 sebanyak 33 orang atau sebesar 62,2%, sedangkan yang mempunyai pendidikan terakhir S2 sebanyak 14 orang atau sebesar 26,4%. Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa, tingkat pendidikan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah jenjang S1.

Variabel informasi dan Komunikasi diukur dengan 6 item pernyataan yang secara memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum 29 dengan nilai rerata 24,58 dan nilai standar deviasi 2,445. Variabel kecenderungan kecurangan Pengadaan Barang dan jasa diukur dengan dengan item pernyataan sebanyak 9 pertanyaan memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum 24 dengan nilai rata – rata 17,15 dan nilai standar deviasi 3,805.

Tabel 2. Distribusi Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Jumlah Dibagikan	60	100%
Jumlah Kembali	53	88.33%
Jumlah Dianalisis	53	88.33%

Sumber: data diolah 2022

Tabel 3. Demografi Responden

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
D3	6	11.4%
S1	33	62.2%
S2	14	26.4%

Sumber: data diolah 2022

Uji Kulit Data dan Pengujian Hipotesis

Pengujian kualitas data yang pertama adalah uji validitas data. Hasil pengujian validitas disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner yang disebarakan pada 53 responden adalah valid karena nilai r-hitung dari semua pernyataan lebih besar dari r-tabel (0,279). Hasil dari uji reliabilitas data disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa instrument penelitian ini tidak memiliki masalah reliabilitas data karena nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel
Informasi dan Komunikasi	Xa	0.635	0.279
	Xb	0.576	0.279
	Xc	0.866	0.279
	Xd	0.300	0.279
	Xe	0.784	0.279
	Xf	0.581	0.279
Kecurangan Pengadaan Barang dan jasa)	Ya	0.365	0.279
	Yb	0.531	0.279
	Yc	0.488	0.279
	Yd	0.443	0.279
	Ye	0.362	0.279
	Yf	0.283	0.279
	Yg	0.530	0.279
	Yh	0.644	0.279
	Y9	0.732	0.279

Sumber: data diolah 2022

Tabel 5. Pengujian Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Informasi dan Komunikasi	0.691
Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa	0.614

Sumber: data diolah 2022

Tabel 6. Pengujian Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov – Smirnov	0.815
Asymp.Sig. (2-Tailed)	0.520

Sumber: data diolah 2022

Tabel 7. Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Beta	Standar Error	t-value	Sig. (p)
Informasi dan Komunikasi	-1.229	0.403	-3.047	0.004
$R^2 = 0.122$ N = 53				

Sumber: Data diolah 2022

Hasil pengujian normalitas sebagaimana disajikan pada tabel 6 juga menunjukkan nilai *Kolmogorov – Smirnov* $p > 0,520$. Hal ini menunjukkan bahwa hasil residual telah berdistribusi normal. Tidak adanya masalah mengenai kualitas data hingga

asumsi residual data yang berdistribusi normal memberikan keyakinan awal bahwa data yang dimiliki sudah memenuhi kriteria *best linier unbiased estimated*. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dapat dilakukan. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 6.

Hasil pengujian pada tabel 7 menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.122 yang indikasikan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 12.2%. Nilai koefisien korelasi pada tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa model adanya informasi dan komunikasi dapat menjelaskan kecenderungan penurunan kecurangan pengadaan barang dan jasa sebesar 12.2%. Hasil penelitian pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai $p > 0.004$ dengan nilai Koefisien Beta - 1.229. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa. Peningkatan nilai dari informasi dan komunikasi dapat menurunkan kecenderungan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu. Ha terdukung.

Hasil penelitian ini selarasa dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti (2011) dan Rahmadhani & Suparno (2020) bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjelaskan perilaku kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Hasil dari penelitian ini memberikan indikasi bahwa adanya informasi dan komunikasi yang baik dapat menurunkan tingkat kecenderungan terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa. Pada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak sekali informasi yang perlu dikomunikasikan secara baik, mulai dari informasi tentang anggaran, perencanaan pengadaan, pelelangan, sampai informasi hasil dari kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Selain informasi yang harus dikomunikasikan secara baik tersebut, kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mengalami kemajuan dalam sistemnya. *e – procurement* merupakan pengadaan secara elektronik. Dibutuhkan sistem yang memadai serta SDM yang ahli agar dapat menjalankan sistem ini. Hal ini membuktikan bahwa informasi dan komunikasi penting adanya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Jika informasi dan komunikasi tidak berjalan secara efektif, dapat dipastikan kecurangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terjadi.

Tidak hanya informasi dan komunikasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa saja yang harus berjalan efektif. Akan tetapi komunikasi antar karyawan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa juga harus terjalin secara baik. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya *misunderstanding* yang mengakibatkan kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Komunikasi yang baik ini juga memudahkan tiap karyawan mencerna dengan baik setiap informasi yang

ada dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu kecenderungan kecurangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat diantisipasi keberadaannya.

Informasi dan komunikasi penting dikarenakan oleh sistem yang mereka pakai dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa memerlukan informasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik. Selain pembagian kuesioner, juga dilakukan beberapa wawancara ringkas dengan salah satu responden yang menjelaskan bahwa kegiatan pengadaan yang sudah tidak dikerjakan secara manual membuat kecurangan menjadi berkurang. Penurunan potensi kecurangan pada mekanise pengaandaan barang dan jasa tersebut karena peserta tender sudah tidak bisa melakukan lobby dan negosiasi pada panitia lelang untuk memenangkan lelang tersebut.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan perspektif teori keagenan Jensen & Meckling (1979) bahwa adanya informasi dan komunikasi dimungkinkan dapat membuat prinsipal mengetahui banyak informasi. Hal ini menyebabkan potensi asimetri informasi dapat diminimalkan. Penurunan asimteri informasi dapat menyebabkan penurunan tendensi perilaku oportunistik salah satunya adalah *fraud*. Hal ini selaras dengan (Rohma, 2022) yang menjelaskan bahwa adanya informasi yang diterima dan proses komunikasi yang dilakukan dapat meminimal asimetri informasi yang dapat menurunkan tendensi perilaku disfungsi. Adanya informasi dan komunikasi yang terbentuk dapat menjadi salah satu saran transfer informasi yang mendorong terbentuknya transparansi. Hal tersebut membuat potensi terjadinya *fraud* menjadi lebih rendah.

SIMPULAN

Perkembangan informasi yang semakin massif mendorong perkembangan mekanisme pengendalian internal yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi cukup efektif memitigasi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Adanya informasi dan komunikasi yang efektif dapat menurunkan asimetri informasi yang berdampak pada penurunan perilaku disfungsi yaitu kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi cukup krusial dalam meminimalkan asimetri informasi untuk menurunkan potensi perilaku disfungsi dan kecurangan. Temuan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dalam mendesain mekanisme pengendalian yang efektif dengan mengelaborasi teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan pada penelitian ini yaitu penelitian ini tidak secara spesifik

menggolongkan jenis kecurangan spesifik pada proses dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, saran untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan perbedaan jenis kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2010). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) II 2013*.
- Choirunnisa, R., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pendetektisian *Fraud*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 119–128.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Hall, J. A. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan *E-government* Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- Hermiyetti. (2011). *PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG*. STEKPI.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Rights and Production Functions: An Application to Labor-Managed Firms and Codetermination. *The Journal of Business*, 52(4), 469–506. <http://www.jstor.org/stable/2352442>
- Korompis, C. W. M. (2014). Dampak Teknologi Informasi dalam Pengendalian Internal untuk Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4), 27–33.
- Melasari, R. (2019). Pengaruh Motivasi Belajar , Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Integrasi Mahasiswa Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 79–93.
- Nugroho, R. S. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1905–1911.
- Nurjanah, Y., Anggraeni, E. P., & Melle, J. Van. (2021). Pengaruh Dimensi *Fraud* Diamond dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi saat Perkuliahan Online. *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 5(2).
- Nuryanti, D. R. P. (2015). Pengaruh Impelementasi E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Survey Pada Dua BUMN di Bandung). *Doctoral Dissertation*. Unpas.

- Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan dan Pendeteksi *Fraud* di Sektor Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daeeah Kota padang Kabupaten Solok. Kota Solok dan kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1–14.
- Puspasari, N. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Doctoral Dissertation*. Universitas Gajah Mada.
- Rahmadhani, L., & Suparno. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran *Fraud*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 400–411.
- Rohma, F. F. (2022). *Mitigating The Harmful Effect of Slack : Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role ?* 17(3), 1–12.
- Rohma, F. F., & Zakiyah, R. D. (2022). Retaliation, Obedience Pressure, and Investigative Decisions on Whistle- blowing Allegations: An Experimental Study. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 14(2), 156–166.
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Romaissah, Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Majalah Neraca*, 65–80.
- Salim, M., Syarifuddin, & Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178–185.
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161–181. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Sektor Publik* (2nd ed.). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Varquez, J. M., Granado, J. A., & Boex, J. (2008). *Fighting Corruption in the Public Sector* (Baltagi, SADka, & Wildasin (eds.); Vol. 48, Issue 2). Elsevier.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hasinah. (2021). *Fraud* Prevention of Government Procurement of Goods and Services in Local Government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809>
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138–148. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>